



**MENJADI ORKESTRA YANG HILANG: MASYARAKAT BETAWI DI TENGAH ARUS
MULTIKULTURALISME JAKARTA DARI PANDANGAN HORACE KALLEN**

**BECOMING A LOST ORCHESTRA: THE BETAWI COMMUNITY AMIDST THE TIDE OF
JAKARTA'S MULTICULTURALISM—A PERSPECTIVE BASED ON HORACE KALLEN**

Ahmad Dzakhir Shidiq^{1*}, Raihan Sulaiman², Rifma Ghulam Dzaljad³

^{1*,2,3} Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, Indonesia

Email: ¹dzakhirshidiq01@gmail.com, ²raihan.sulaiman17@gmail.com, ³rifmaghulam@uhamka.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 26, 2026

Revised March 10, 2026

Accepted April 10, 2026

Available online April 15, 2026

Kata Kunci:

Kritik Sosial, Horace Kallen,
Multikulturalisme,
Marginalisasi, Masyarakat
Betawi

Keywords:

*Social Criticism, Horace Kallen,
Multiculturalism,
Marginalization, Betawi Society*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji marginalisasi masyarakat Betawi sebagai etnik asli Jakarta melalui perspektif Kritik Sosial dengan teori pluralisme budaya Horace Kallen. Penelitian kualitatif berbasis data sekunder ini menunjukkan bahwa penggusuran sistematis pada 1950-an-1970-an, urbanisasi tak terkendali, rendahnya pendidikan, dan kerentanan ekonomi telah memaksa Betawi kehilangan tanah dan identitas budaya. Teori Kallen dengan metafora "orkestra" relevan untuk mengkritisi kebijakan *melting pot*, namun memiliki keterbatasan karena mengabaikan realitas kekuasaan dan dimensi material. Diperlukan teori sosial kritis yang membongkar relasi kuasa dan kapitalisme di balik narasi "pembangunan". Pluralisme sejati membutuhkan transformasi struktural dengan pengakuan hak atas tanah, pendidikan, dan sumber daya secara adil, bukan sekadar pengakuan simbolik. Kasus Betawi menegaskan bahwa multikulturalisme tanpa keadilan struktural adalah kosong, dan "Bhinneka Tunggal Ika" tanpa pengakuan hak hanyalah slogan. Tugas kritik sosial adalah mengembalikan suara Betawi sebagai subjek hidup dalam orkestra Jakarta.

ABSTRACT

*This article examines the marginalization of the Betawi people—Jakarta's indigenous ethnic group—through the lens of social criticism, utilizing Horace Kallen's theory of cultural pluralism. This qualitative study, based on secondary data, reveals that systematic evictions between the 1950s and 1970s, uncontrolled urbanization, low educational attainment, and economic vulnerability have forced the Betawi to lose both their land and their cultural identity. While Kallen's "orchestra" metaphor offers a relevant critique of "melting pot" policies, it has limitations, as it overlooks the realities of power dynamics and material dimensions. A critical social theory is required to expose the power relations and capitalism underlying the narrative of "development." True pluralism demands structural transformation—specifically the equitable recognition of rights to land, education, and resources—rather than mere symbolic acknowledgment. The Betawi case underscores that multiculturalism devoid of structural justice is hollow, and that the national motto *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity) remains a mere slogan without the recognition of rights. The task of social criticism is to restore the Betawi voice as an active subject within the orchestra of Jakarta.*

PENDAHULUAN

Jakarta, sebagai ibu kota negara Indonesia, merupakan kota metropolitan yang menjadi miniatur keberagaman bangsa. Hampir seluruh suku dan etnik dari berbagai penjuru Nusantara hadir dan berinteraksi di dalamnya. Namun, di tengah gemerlap kemajuan dan hiruk-pikuk modernitas, terdapat ironi mendalam: masyarakat Betawi sebagai etnik asli Jakarta justru semakin tersisih dari kotanya sendiri. Mereka yang secara historis adalah "tuan rumah" kini seringkali menjadi "pendatang" di tanah kelahiran mereka sendiri [1].

Filsuf Horace Kallen, pada awal abad ke-20, menawarkan sebuah cara pandang yang berbeda tentang bagaimana masyarakat multikultural seharusnya hidup bersama. Menolak metafora "kawah peleburan" yang mengharuskan imigran melebur dan kehilangan identitas aslinya, Kallen mengusulkan konsep cultural pluralism dengan metafora orkestra: setiap kelompok etnik adalah instrumen berbeda seperti biola, cello, terompet, dan drum dimana masing-masing dari alat musik itu memiliki suara yang khas, namun bersama-sama menciptakan harmoni yang indah. Baginya, "setiap kelompok etnik adalah instrumen alami, roh dan budayanya adalah tema dan melodinya, dan harmoni serta disonansi dari semuanya membentuk simfoni peradaban" [2].

Dalam metafora orkestra Kallen, setiap kelompok etnik adalah instrumen dengan timbre dan nada khas yang berkontribusi membentuk simfoni peradaban. Setiap instrumen memiliki tema dan melodinya sendiri, dan harmoni serta disonansi dari keseluruhan instrumen inilah yang membentuk simfoni peradaban. Dengan kata lain, keindahan sebuah masyarakat multikultural tidak terletak pada penghapusan perbedaan, melainkan pada kemampuannya untuk mensinergikan berbagai identitas budaya yang ada menjadi sebuah harmoni yang kaya dan dinamis.

Namun, metafora indah ini tampaknya tidak berlaku sepenuhnya bagi masyarakat Betawi. Alih-alih menjadi instrumen yang diperhatikan dan dihormati dalam orkestra Jakarta, mereka justru dipinggirkan dengan instrumennya yang masih ada, namun suaranya kian redup, bahkan nyaris tak terdengar. Chaer (2015), budayawan Betawi, mengatakan bahwa kebudayaan Betawi berada dalam keadaan utuh hanya sampai era 1950-an; setelah itu, kebudayaan Betawi menjadi tidak utuh lagi karena pendukung kebudayaan itu, yaitu masyarakat Betawi, mulai bercerai-berai.[3]

Fenomena ini menarik untuk dianalisis melalui lensa teori multikulturalisme, khususnya pandangan Horace Kallen. Kallen, seorang filsuf Amerika keturunan Yahudi, mengembangkan teori pluralisme budaya sebagai respons terhadap gagasan "melting pot" yang mengharuskan imigran meleburkan identitas budaya mereka ke dalam satu budaya homogen Amerika. Kallen justru melihat nilai positif dalam keberagaman dan mengusulkan metafora orkestra untuk menggambarkan masyarakat multikultural yang ideal.

Dan fenomena ini bukanlah kejadian spontan, melainkan produk dari proses panjang yang dimulai sejak era kolonial dan semakin masif pada masa pembangunan Orde Baru. Penggusuran kampung-kampung Betawi, konversi lahan pertanian menjadi kawasan komersial dan permukiman elit, serta banjir urbanisasi yang tidak terkendali telah mengakibatkan masyarakat Betawi tergusur ke pinggiran kota seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) [1]. Akibatnya, terjadi perubahan fundamental pada pola hidup, mata pencaharian, dan bahkan eksistensi budaya Betawi itu sendiri.

Artikel ini mengkaji fenomena tersebut dengan berfokus pada dua episode historis marginalisasi masyarakat Betawi: penggusuran di Senayan (1959-1962) untuk pembangunan Gelora Senayan dan kawasan sekitarnya, serta penggusuran di Kuningan (1973-1992) untuk pembangunan kawasan segitiga emas. Melalui kasus-kasus ini, penulis akan menunjukkan bagaimana proyek pembangunan kota yang tidak inklusif telah membuat "orkestra" Kallen kehilangan salah satu instrumen terpentingnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kritik sosial sebagai pisau analisis utamanya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena marginalisasi masyarakat Betawi secara mendalam dan kontekstual, serta menangkap kompleksitas relasi kuasa yang melingkupinya. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengutamakan generalisasi melalui angka, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami makna-makna subjektif, konstruksi sosial, dan praktik-praktik dominasi yang tersembunyi di balik kebijakan pembangunan kota dan realitas sosial masyarakat Betawi. Perspektif kritik sosial yang diusung dalam penelitian ini secara sadar memposisikan peneliti bukan sebagai pengamat netral yang sekadar mendeskripsikan realitas, melainkan sebagai kritikus sosial yang berupaya membongkar ketimpangan, dominasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggengkan marginalisasi kelompok masyarakat tertentu.

Penelitian ini difokuskan pada wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai lokus utama, dengan pertimbangan bahwa kedua wilayah ini merupakan pusat pembangunan kota dan lokasi dari

berbagai proyek infrastruktur serta penggusuran yang paling masif terjadi pada periode 1950-an hingga 1970-an. Pemilihan periode temporal ini didasarkan pada argumen bahwa pada masa itulah proses marginalisasi struktural terhadap masyarakat Betawi mencapai puncaknya, dimulai dengan pembongkaran perkampungan Betawi untuk pembangunan Kota Satelit Kebayoran Baru pada 1949, dilanjutkan dengan penggusuran kampung Senayan dan Petunduan untuk Asian Games 1962, hingga pembongkaran kampung Kuningan dan Pondok Pinang pada akhir 1960-an untuk fasilitas perkantoran dan perumahan mewah. Dengan demikian, kasus yang dikaji secara spesifik adalah masyarakat Betawi sebagai etnik asli Jakarta yang mengalami ketersingkirkan secara sistemik akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak dan gelombang urbanisasi yang tidak terkendali.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas tentang masyarakat Betawi dan multikulturalisme; buku dan monograf tentang sejarah Jakarta dan masyarakat Betawi; dokumen sejarah dan arsip tentang pembangunan Jakarta; hasil-hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi; serta artikel dan liputan media massa, termasuk hasil survei Litbang Kompas (2025) tentang kondisi seniman Betawi dan tingkat pengenalan kesenian Betawi di kalangan masyarakat Jakarta.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kritik sosial yang terdiri dari beberapa tahapan sistematis. **Tahap pertama** adalah identifikasi masalah sosial, yaitu menggambarkan secara komprehensif fenomena marginalisasi masyarakat Betawi sebagai produk dari struktur sosial dan kebijakan yang timpang, bukan sekadar sebagai persoalan individual atau kultural semata. **Tahap kedua** adalah analisis dominasi dan kuasa, yang bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor utama, kepentingan-kepentingan yang bermain, serta mekanisme-mekanisme struktural yang melanggengkan ketersingkirkan masyarakat Betawi dari kampung-kampung mereka. **Tahap ketiga** adalah kritik ideologi, yaitu upaya membongkar asumsi-asumsi mendasar yang melandasi kebijakan pembangunan kota, seperti keyakinan bahwa "pembangunan sama dengan kemajuan" dan "penggusuran adalah keharusan modernisasi" yang selama ini digunakan untuk melegitimasi praktik dominasi terhadap masyarakat Betawi. **Tahap keempat** adalah refleksi kritis, yaitu menyusun argumen-argumen alternatif yang tidak hanya mengkritisi realitas yang ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkeadilan bagi masyarakat Betawi. Seluruh tahapan analisis ini kemudian diinterpretasikan melalui lensa teori pluralisme budaya Horace Kallen, dengan tetap memberikan perhatian kritis terhadap keterbatasan teori tersebut dalam menjelaskan realitas marginalisasi struktural yang dialami oleh masyarakat Betawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Betawi: Sejarah dan Identitas

a). Asal-usul dan Pembentukan Etnik Betawi

Masyarakat Betawi adalah etnik yang terbentuk dari proses percampuran budaya yang panjang di Batavia (sekarang Jakarta). Menurut sejarah, orang Betawi telah ada jauh sebelum Jan Pieterzoon Coen membakar Jayakarta pada tahun 1619 dan mendirikan kota bernama Batavia di atas reruntuhannya. Bahkan, sejak Zaman Batu Baru atau Neolitikum, sekitar 1500 SM, sekelompok besar penduduk telah mendiami wilayah yang kini menjadi Jakarta.

Identitas Betawi terbentuk melalui proses akulturasi yang intens antara berbagai kelompok etnik dan bangsa: penduduk asli (Sunda, Jawa, dan lainnya), pedagang dari berbagai kepulauan Nusantara, serta bangsa asing seperti Tionghoa, Arab, India, Portugis, dan Belanda. Percampuran ini terjadi melalui perkawinan antaretnik dan interaksi sosial-ekonomi yang berlangsung selama berabad-abad.

Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan dari percampuran darah berbagai etnik dan bangsa yang merupakan hasil perkawinan antaretnik dan antarbangsa di masa lalu, sebagaimana terlihat dalam upacara keagamaan dan adat istiadat mereka. Sifat campuran dari dialek Betawi mencerminkan budaya Betawi secara umum, yang merupakan hasil perkawinan berbagai budaya, baik dari daerah lain di Indonesia maupun budaya asing [4].

b). Karakteristik Masyarakat Betawi

Berdasarkan karakteristik budayanya, etnik Betawi terbagi menjadi dua kelompok utama:

1. Betawi Tengah (Betawi Kota): Tinggal di wilayah Jakarta Pusat (yang dulu merupakan Karesidenan Batavia), di bawah pengaruh kuat budaya Melayu (Islam). Masyarakat Betawi Tengah memegang teguh gaya hidup lama, seperti merayakan upacara pernikahan, khitanan, tradisi Idul Fitri, dan memegang teguh agama serta adat istiadat. Dalam bidang kesenian, mereka menikmati keroncong Tugu, musik Gambus, Qasidah, orkes Rebana, dan menyukai cerita-cerita Islam seperti kisah Seribu Satu Malam.
2. Betawi Pinggiran (Betawi Udik/Ora): Terbagi lagi menjadi dua subkelompok: (a) kelompok dari bagian utara dan barat Jakarta serta Tangerang yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa; dan (b) kelompok dari bagian timur dan selatan Jakarta, Bekasi, dan Bogor yang dipengaruhi oleh budaya dan adat Sunda.

Selain itu, masyarakat Betawi dikenal dengan sikap toleransi yang tinggi. Sikap toleransi ini ditandai dengan jiwa gotong royong, sabar, menghargai perbedaan, dan lapang dada atas perbedaan yang terjadi tanpa harus mengorbankan keyakinan yang dimiliki. Namun, seperti akan kita lihat, sikap toleransi ini terutama dalam merelakan tanahnya untuk pembangunan itu justru menjadi salah satu faktor yang memudahkan proses marginalisasi mereka.

B. Proses Marginalisasi Masyarakat Betawi

a). Penggusuran Kampung-Kampung Betawi

Proses marginalisasi masyarakat Betawi dimulai secara masif pada periode 1950-an hingga 1970-an, melalui penggusuran kampung-kampung Betawi di pusat kota Jakarta. Abdul Chaer mencatat bahwa pembongkaran kampung-kampung Betawi sudah dimulai sejak 1949 untuk dibangun Kota Satelit Kebayoran Baru. Pada waktu itu, tidak kurang dari 730 hektar perkampungan Betawi dibongkar, beserta 1.688 buah rumah, kandang ternak serta 700.000 pohon produktif milik orang Betawi [3].

Pembongkaran kedua dilakukan terhadap kampung Senayan dan Petunduan untuk membangun fasilitas olahraga dalam rangka penyelenggaraan Asian Games (1962). Setelah itu, pada akhir 1960-an, giliran kampung Kuningan dan Pondok Pinang dibongkar untuk fasilitas perkantoran dan perumahan mewah. Kemudian disusul pembongkaran di seluruh wilayah Jakarta tanpa terkendali.

Kasus penggusuran di Senayan pada tahun 1959 merupakan salah satu contoh yang paling menggambarkan situasi ini. Masyarakat Betawi yang tinggal di Senayan dengan ikhlas mengikuti permintaan pemerintah untuk mengosongkan lahan mereka untuk pembangunan kompleks Senayan. Salah satu tokoh Betawi, Yahya, menjelaskan bahwa masyarakat Betawi "teramat gampang percaya kepada omongan orang yang dihormati", sehingga mereka dengan ikhlas menerima penggusuran dan pindah ke tempat lain [5].

b). Perubahan Pola Pemukiman dan Kehidupan

Perubahan dari berkehidupan di kampung dengan tanah yang luas menjadi berkehidupan dalam kompleks perumahan dengan tanah yang sempit menyebabkan hilangnya berbagai permainan tradisional anak-anak seperti main dampu, main gala asin, atau main ketok kadal yang memerlukan lahan luas. Demikian pula, permainan yang memerlukan alat dari kebun seperti main kuda-kudaan atau main bandring menjadi punah karena tidak ada lagi pohon pisang yang menjadi alat permainan.

Perubahan pola pemukiman ini juga mengubah mata pencaharian masyarakat Betawi. Jika pada awalnya mereka berkehidupan dari hasil tanah atau kebunnya, kini mereka harus hidup dari bekerja sebagai buruh, pegawai, dan pedagang kecil atau bekerja sebagai apa saja.

c). Faktor-Faktor Penyebab Marginalisasi

Beberapa faktor utama penyebab marginalisasi masyarakat Betawi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembangunan Kota

Sebagai ibu kota pemerintahan, Jakarta dibayangkan oleh Presiden Soekarno sebagai personifikasi semangat kekuatan bangsa-bangsa yang baru merdeka dari penjajahan di sebuah kota besar modern dengan bangunan, fasilitas, dan kehidupan modern. Gagasan ini diteruskan

pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin (1966-1977), yang membangun Jakarta menjadi kota metropolitan. Kebutuhan lahan untuk berbagai jenis fasilitas seperti perkantoran, perumahan, sarana kesehatan, atau sarana olahraga semakin lama semakin meningkat dan telah menimbulkan persoalan pertanahan di kalangan orang Betawi, termasuk pembelian tanah penduduk secara murah atau secara paksa.

Ali Sadikin berhasil membangun Jakarta dengan berbagai prestasi: peremajaan Pasar Senen, pemindahan Kebun Binatang dari Cikini ke Ragunan, pembangunan Taman Ismail Marzuki (TIM), pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, pembangunan serta renovasi berbagai kepentingan publik seperti rumah sakit, puskesmas, bus transportasi umum, sekolah, pasar, gelanggang remaja, fasilitas olahraga, membantu mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelebaran jalan serta jembatan.

Namun, di balik suksesnya pembangunan Jakarta, terdapat dampak marginalisasi terhadap masyarakat Betawi. Penggusuran di Jakarta yang "tuna kemanusiaan, tuna kebudayaan" memperlebar jurang sosial dan meniadakan kelas sosial masyarakat lokal, sehingga mengalienasi keberadaan orang Betawi sebagai penduduk lokal.

2. Urbanisasi dan Perubahan Demografis

Jumlah penduduk Betawi benar-benar terhitung di tahun 1961. Lance Castles menggambarkan bahwa penduduk Jakarta Asli (Orang Betawi) hanya berjumlah 655.400 orang, dan hanya menduduki urutan ketiga dari 16 kelompok suku yang menjadi penduduk Jakarta [5].

Masyarakat Betawi mulai tersingkirkan dari kampung-kampung mereka di pusat kota Jakarta. Dulu kampung Betawi tengah kota terletak di wilayah Taman Sari, Sawah Besar, Kebon Jeruk, Krokot, Krukut, Kramat, Tanah Abang, Cikini, Kali Pasir, Petojo, Tanah Sereal, Kemayoran, Petamburan, Karet, dan Kebon Sirih. Namun, karena maraknya penggusuran dan banyaknya pendatang, masyarakat Betawi kalah saing dengan pendatang dari kota lain.

Seperti yang dijelaskan oleh Tohir, seorang tokoh Betawi: "Bukan kalah-kalah lagi namanya. Orang pendatang ke sini bawa bekal pendidikan, bekal keahlian, dan apa saja yang dikerjakan dia mau, tapi orang Betawi engga mau... Jumlah orang Betawi kan sedikit sekali, waktu saya masih menjabat sebagai ketua RW itu ada 37 kepala keluarga, dari 37 kepala keluarga hanya 10 keluarga yang orang Betawi. Kalau sekarang tinggal 4 orang dari sekian banyaknya penduduk. Nah itu akibatnya dari urbanisasi. Kita kalah" [5].

3. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat Betawi pada tahun 1950-an hingga awal 1960-an belum menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan. Tohir menceritakan bahwa kehidupan masyarakat Betawi pada saat itu "biasa-biasa aja karena bodoh, mereka ga mempunyai pendidikan formal maupun non-formal. Jadi agak susah juga. Waktu dulu yang sebaya saya engga ada yang sekolah".

Hal ini karena sekolah-sekolah lebih terkonsentrasi di pusat kota dan hanya bisa diakses oleh masyarakat golongan tertentu. Pola pikir masyarakat Betawi kala itu juga masih mementingkan mengaji dan bela diri. Masyarakat Betawi lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah atau sekolah berbasis Islam lainnya karena anggapan bahwa sekolah-sekolah formal yang ada saat itu adalah warisan kolonial dan banyak dikelola oleh orang-orang Kristen.

4. Kondisi Ekonomi yang Rentan

Keadaan ekonomi masyarakat Betawi pada masa itu juga tidak jauh berbeda. Tohir menjelaskan bahwa pekerjaan masyarakat Betawi saat itu "kebanyakan tani-tani begitu aja, ada yang dagang kopi, dagang nasi".

Kebanyakan orang Betawi memang memiliki lahan yang luas, akan tetapi mereka umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga mereka masih mengandalkan hidup dengan bertani atau berkebun, menjadi penjual susu, menjadi kusir sado, dan hanya sebagian orang Betawi saja yang bisa menjadi pegawai.

Saat itu cara paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan menjual tanah. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat Betawi kehilangan tanah mereka dan harus termarginalisasi menuju pinggiran kota Jakarta. Hal ini kemudian memunculkan stereotip yang sangat kuat yaitu "Orang Betawi tukang jual tanah" [1].

Dan salah satu dampak paling nyata dari marginalisasi adalah hilangnya rumah adat Betawi yang semakin langka. Rumah Kebaya, yang merupakan rumah adat atau rumah tradisional Betawi dengan bentuk atap menyerupai pelana yang dilipat (mirip lipatan kebaya), kini semakin sulit dijumpai [6].

C. Analisis Kritis atas Teori Kallen: Dari Pluralisme ke Kritik Struktur

Metafora orkestra yang digagas Kallen menggambarkan sebuah masyarakat ideal di mana setiap kelompok etnik, seperti instrumen dalam orkestra, berkontribusi dengan suara khasnya untuk menciptakan harmoni peradaban. Dalam metafora ini, masyarakat Betawi seharusnya menjadi salah satu "instrumen" penting yang memperkaya "orkestra" Jakarta dengan budaya, bahasa, kesenian, dan kearifan lokalnya yang khas.

Namun, realitas menunjukkan sebaliknya. Masyarakat Betawi, yang seharusnya menjadi "biola pertama" atau setidaknya salah satu instrumen utama dalam orkestra Jakarta, justru kehilangan tempat untuk "bermusik". Mereka bukan hanya kehilangan ruang fisik (lahan dan pemukiman), tetapi juga ruang kultural (pengakuan, pelestarian, dan regenerasi budaya). Dalam bahasa metafora Kallen, instrumen Betawi semakin tidak terdengar dalam simfoni Jakarta.

Yang terjadi di Jakarta bukanlah "orkestra" yang harmonis, melainkan **dominasi** yang di mana budaya dan kepentingan kelompok tertentu (negara, pengembang, pendatang dengan modal ekonomi dan pendidikan) mendominasi dan menyingkirkan yang lain. Kallen mengkritik program "Americanization" yang menurutnya "mostly in the interest of Anglo-Saxon business classes and against the spirit of democracy". Namun, ia gagal menyadari bahwa pluralisme budaya yang ia bayangkan juga dapat menjadi "topeng" bagi dominasi kelas dan kepentingan kapitalis, sebagaimana terjadi di Jakarta.

Kasus Betawi menjadi batu uji bagi idealisme Kallen. Apakah sebuah "orkestra" dapat berfungsi dengan baik jika salah satu pemain utamanya kehilangan tempat untuk memainkan alat musiknya? Jawabannya tentu tidak. Orkestra yang kehilangan salah satu instrumen utamanya akan menghasilkan musik yang timpang dan tidak harmonis.

Teori Kallen terlalu optimis dan mengabaikan realitas kekuasaan. Ia mengasumsikan bahwa setiap kelompok akan diakui dan dihargai secara setara adalah sebuah asumsi yang naif jika tidak mempertanyakan siapa yang memegang kuasa untuk mengakui, dan siapa yang berhak menentukan nilai dari suatu budaya. Dalam kasus Betawi, pengakuan budaya hanya diberikan sejauh tidak mengganggu kepentingan pembangunan dan kapitalisme. "Pelestarian budaya" sering direduksi menjadi sekadar "pelestarian simbol" seperti ondel-ondel yang dijadikan ikon pariwisata tanpa diiringi perlindungan atas hak-hak material masyarakat pemilik budaya tersebut.

D. Abaian terhadap Dimensi Struktural dan Ekonomi

Kritik paling tajam terhadap Kallen datang dari para sejarawan dan teoritikus sosial yang menilai bahwa ia "placed undue importance upon the realm of culture" dan "failed adequately to question the Enlightenment reliance upon technical reason as a force for radical transformation". Pandangannya justru "was absorbed by corporate capitalism even as it contributed to the growing cultural civil war". Dalam konteks Betawi, ini berarti bahwa Kallen (dan para pengikutnya) terlalu fokus pada "pengakuan budaya" dan mengabaikan dimensi material yang menentukan posisi Betawi dalam struktur sosial.

Marginalisasi Betawi bukan hanya soal "tidak diakuinya" budaya Betawi, tetapi lebih fundamental: hilangnya akses terhadap tanah, pendidikan, dan pekerjaan yang semuanya ditentukan

oleh struktur kekuasaan dan kapitalisme. Pengakuan budaya tanpa pengakuan hak atas tanah dan sumber daya adalah pengakuan yang kosong. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian tentang hukum adat Betawi, pendekatan "pelestarian budaya" dalam peraturan daerah, seperti Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang tidak efektif dalam menghentikan marginalisasi karena tidak memberikan dasar hukum bagi hak-hak esensial seperti hak atas tanah.

E. "Cultural Pluralism" sebagai Kritik, tetapi Juga sebagai Batas

Di satu sisi, teori Kallen tetap relevan sebagai alat kritik. Ia menolak "melting pot" yang memaksa imigran meninggalkan identitas budaya mereka. Dalam konteks Indonesia, "melting pot" versi lokal adalah wacana "pembangunan" dan "modernisasi" yang memaksa masyarakat Betawi dan masyarakat adat lainnya untuk meninggalkan cara hidup mereka demi "kemajuan". Kallen akan menolak keras kebijakan penggusuran yang mengabaikan hak-hak masyarakat asli, karena hal itu bertentangan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap identitas budaya.

Di sisi lain, teori Kallen tidak cukup untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana marginalisasi terjadi. Ia tidak memiliki alat analisis untuk membongkar relasi kuasa, kelas, dan kapitalisme yang menjadi motor utama marginalisasi. Ia terlalu fokus pada "pengakuan" dan "harmoni" dan mengabaikan konflik dan perjuangan yang tak terhindarkan dalam masyarakat yang tidak setara.

Kasus Betawi menunjukkan bahwa pluralisme budaya tidak cukup diwujudkan melalui "pengakuan" simbolik seperti menjadikan ondel-ondel sebagai ikon Jakarta atau mengadakan festival budaya Betawi setahun sekali. Pluralisme budaya yang sejati membutuhkan transformasi struktural dan pembagian ulang akses terhadap tanah, pendidikan, dan sumber daya ekonomi secara adil. Tanpa itu, pluralisme budaya hanyalah "lipstik" yang menutupi wajah kota yang tetap timpang dan tidak adil.

a). Pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Kallen

Fenomena marginalisasi Betawi dapat dibaca sebagai pelanggaran terhadap beberapa prinsip dasar pluralisme budaya Kallen:

1) Pelanggaran terhadap Pengakuan atas Identitas

Kallen menekankan bahwa identitas etnik bersifat mendasar dan tidak dapat diubah begitu saja. Ia menyatakan, "Men cannot... change their grandfathers" (Manusia tidak bisa mengganti kakek-nenek mereka). Dalam konteks Betawi, identitas mereka sebagai etnik asli Jakarta seharusnya diakui dan dilindungi. Namun, realitas menunjukkan bahwa identitas Betawi justru terpinggirkan dan bahkan sering dianggap sebagai "penghalang" kemajuan kota.

2) Pelanggaran terhadap Kesetaraan dalam Perbedaan

Kallen menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dalam demokrasi adalah kesetaraan dalam perbedaan. Setiap kelompok etnik memiliki kontribusi berharga yang memperkaya totalitas budaya bangsa. Namun, dalam kasus Betawi, terjadi ketidaksetaraan yang sistemik: masyarakat Betawi kehilangan tanah dan pemukiman mereka untuk kepentingan pembangunan yang lebih menguntungkan kelompok lain. Mereka menjadi "penonton" dalam gerak langkah pembangunan Jakarta, seperti yang diungkapkan oleh Blackburn.

3) Gagalnya Harmoni dari Keberagaman

Bagi Kallen, keindahan sebuah masyarakat multikultural terletak pada kemampuannya untuk mensinergikan berbagai identitas budaya yang ada menjadi sebuah harmoni yang kaya dan dinamis. Namun, Jakarta justru menunjukkan ketidakharmonisan: masyarakat Betawi tersingkir, budaya mereka terdegradasi, dan identitas mereka semakin kabur. Yang terjadi bukanlah harmoni, melainkan dominasi yang di mana budaya dan kepentingan kelompok tertentu mendominasi dan menyingkirkan yang lain.

Salah satu aspek yang paling ironis dalam kasus Betawi adalah peran sikap toleransi mereka dalam memudahkan proses marginalisasi. Seperti telah disebutkan, masyarakat Betawi dikenal dengan sikap toleransi yang tinggi, gotong royong, sabar, menghargai perbedaan, dan lapang dada atas perbedaan yang terjadi.

Sikap toleransi dari penduduk betawi terutama dalam merelakan tanahnya untuk pembangunan ini justru menjadi faktor yang memudahkan penggusuran dan perampasan tanah. Orang Betawi yang toleran merelakan tanahnya untuk dijual demi pembangunan Jakarta. Mereka dengan ikhlas mengikuti permintaan pemerintah untuk mengosongkan lahan mereka, seperti yang terjadi di Senayan.

F. "Orkestra" yang Hilang dan Perlawanan yang Muncul

Kasus Betawi menunjukkan bahwa multikulturalisme di Jakarta masih bersifat semu. Narasi "kota metropolitan yang multikultural" dan "Bhineka Tunggal Ika" tidak diiringi dengan pengakuan dan perlindungan nyata terhadap identitas budaya masyarakat aslinya. Betawi, yang seharusnya menjadi "biola pertama" atau setidaknya instrumen utama dalam orkestra Jakarta, justru kehilangan tempat untuk "bermusik."

Namun, di tengah potret buram ini, muncul perlawanan dalam berbagai bentuk. Penelitian tentang fenomena "Betawi Punye Distro" menunjukkan bahwa kemunculan industri kreatif Betawi saat ini adalah sebagai bentuk perlawanan terselubung terhadap stereotip inferior yang dilekatkan pada mereka, sekaligus upaya untuk membangun sense of collectivism dan wujud eksistensi Budaya Betawi di tengah masyarakat Jakarta yang multikultural. Ini adalah bentuk perlawanan kultural yang menunjukkan bahwa meskipun ruang fisik dan kultural mereka semakin sempit, identitas Betawi tetap bertahan dan bahkan direvitalisasi melalui cara-cara baru yang kreatif.

Dalam perspektif kritik sosial, perlawanan ini penting, tetapi tidak cukup. Perlawanan kultural harus diiringi dengan perjuangan struktural yaitu perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hak-hak kolektif, hak atas tanah, akses pendidikan dan ekonomi yang adil, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan kota. Sebagaimana disimpulkan dalam penelitian tentang hukum adat Betawi, diperlukan "a paradigm shift from cultural preservation to rights recognition" pergeseran paradigma dari "pelestarian budaya" ke "pengakuan hak". Pengakuan atas masyarakat Betawi sebagai masyarakat hukum adat akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak kolektif mereka dan memastikan bahwa kearifan lokal tidak hanya dilestarikan sebagai objek, tetapi hidup sebagai subjek hukum yang relevan di tengah Jakarta modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji marginalisasi masyarakat Betawi melalui lensa Kritik Sosial dengan menggunakan teori pluralisme budaya Horace Kallen sebagai pisau analisis. Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa marginalisasi masyarakat Betawi bukanlah fenomena kebetulan, melainkan produk kebijakan pembangunan kota yang sistematis dan tidak berpihak, yang mencapai puncaknya pada periode 1950-an hingga 1970-an melalui penggusuran kampung-kampung Betawi di Jakarta Pusat dan Selatan. Negara dan kapitalisme bersekutu mengambil alih tanah milik masyarakat Betawi dengan dalih "pembangunan" dan "modernisasi", sebuah narasi yang digunakan untuk melegitimasi praktik dominasi. Terdapat empat faktor struktural yang menjadi penyebab marginalisasi: kebijakan pembangunan kota yang mengabaikan hak masyarakat lokal; urbanisasi tidak terkendali yang mengubah komposisi demografis; rendahnya tingkat pendidikan sebagai warisan kolonial yang menciptakan eksklusivitas struktural; serta kondisi ekonomi rentan yang memaksa Betawi menjual tanah dan melahirkan stereotip "Orang Betawi tukang jual tanah" sebagai bentuk *victim blaming*. Dampaknya bersifat fisik dan kultural: hilangnya ruang hidup, tergusurnya Betawi ke Bodetabek, punahnya tradisi dan permainan rakyat, degradasi kesenian seperti lenong dan wayang kulit Betawi, serta ondel-ondel yang kini direduksi menjadi alat mengamen di jalanan.

Teori pluralisme budaya Kallen dengan metafora "orkestra" memiliki relevansi sebagai alat kritik terhadap kebijakan *melting pot* yang memaksa kelompok minoritas meninggalkan identitasnya, namun juga memiliki keterbatasan mendasar. Kallen terlalu optimis dan mengabaikan realitas kekuasaan dengan mengasumsikan setiap kelompok akan diakui setara tanpa mempertanyakan siapa yang memegang kuasa untuk mengakui dan menentukan nilai suatu budaya dalam kasus Betawi, pengakuan budaya hanya diberikan sejauh tidak mengganggu kepentingan pembangunan dan kapitalisme. Selain

itu, Kallen terlalu fokus pada dimensi kultural dan mengabaikan dimensi material serta akses terhadap tanah, pendidikan, dan pekerjaan yang menentukan posisi kelompok dalam struktur sosial, padahal marginalisasi Betawi bukan hanya soal "tidak diakui"nya budaya, tetapi hilangnya akses terhadap sumber daya yang menentukan kelangsungan hidup dan reproduksi budaya mereka. Dengan demikian, diperlukan teori sosial kritis yang melampaui Kallen untuk mempertanyakan siapa pemilik kuasa kebijakan, kepentingan siapa yang dilayani, bagaimana kapitalisme dan negara bersekutu mengambil alih tanah Betawi, serta bagaimana wacana "pembangunan" digunakan untuk melegitimasi dominasi, karena pluralisme budaya sejati membutuhkan transformasi struktural dan pembagian ulang akses terhadap tanah, pendidikan, dan sumber daya secara adil.

Penelitian ini merekomendasikan lima kebijakan: pengakuan hak-hak kolektif masyarakat Betawi melalui pergeseran paradigma dari "pelestarian budaya" ke "pengakuan hak" dengan mengakui Betawi sebagai masyarakat hukum adat; kebijakan pembangunan kota yang partisipatif dan berpihak pada masyarakat lokal; akses pendidikan yang adil dan merata; perlindungan dan revitalisasi ruang budaya Betawi baik fisik maupun kultural; serta pendidikan multikultural yang kritis yang tidak hanya mengajarkan toleransi tetapi juga membongkar struktur kekuasaan yang melanggengkan ketimpangan. Kasus Betawi adalah pelajaran penting bahwa multikulturalisme tanpa keadilan struktural adalah kosong, "Bhineka Tunggal Ika" tanpa pengakuan hak adalah slogan, dan pembangunan kota tanpa perlindungan masyarakat asli adalah pengkhianatan. Tugas kritik sosial bukan sekadar memahami dunia, tetapi mengubahnya dan perubahan itu dimulai dari pengakuan bahwa "orquestra" Jakarta tidak akan harmonis selama Betawi terus kehilangan suara. Masyarakat Betawi berhak kembali bersuara sebagai subjek hidup yang berkontribusi pada simfoni kota metropolitan yang sesungguhnya, bukan sekadar warisan yang dilestarikan di museum atau festival.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Halimatusa'diah, "STRATEGI PERLAWANAN TERHADAP STEREOTIP INFERIOR BETAWI PUNYE DISTRO : A STATEGY OF RESISTANCE TO INFERIOR STEREOTYPES," *J. Masy. dan Budaya*, vol. 21, no. 1, pp. 59–76, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.814>
- [2] H. M. Kallen, *Culture and democracy in the United States*. New York: Boni and Liveright., 1924.
- [3] A. Chaer, *Kebudayaan Betawi: Dari Zaman Kolonial sampai Era Reformasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas., 2015.
- [4] S. Hadijah *et al.*, "The Uniqueness of Betawi Arts in Betawi Culture in Jakarta-Indonesia," *Int. J. Multicult. Multireligious Underst.*, pp. 214–230, 2025.
- [5] N. Lukmansyah, "PENGARUH PEMBANGUNAN DI JAKARTA TERDAHAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT BETAWI TAHUN 1966-1977," 2017.
- [6] E. F. Santika, "5 Fakta Rumah Kebaya yang Nyaris Punah, Hunian Asli Orang Betawi yang 'Tak Punya' Kamar Mandi," *Tribun wiki*, 2019. [Online]. Available: <https://jakarta.tribunnews.com/2019/02/07/5-fakta-rumah-kebaya-yang-nyaris-punah-hunian-asli-orang-betawi-yang-tak-punya-kamar-mandi>